

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ema Fitri Lubis dan Tuti Khairani Harahap

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation of the National Programme for Women's Empowerment. This research aims to find out the implementation and the obstacles encountered in implementing the activities of the SPP (Women's Saving and Loans) in Nagari Tanjung Betung, Regency of Pasaman. The method used in this research is descriptive qualitative research, data collection by means of interviews, observation, and documentation with UPK Team and community users group of SPP (Women's Savings and Loans) in Nagari Tanjung Betung. The results showed that in terms of the interests that are affected by the policy are enshrined the importance either for UPK, implementing areas, and SPP funds users, still lack of the benefits and changes in the gain due to a goal from inappropriate programs, namely on Non RTM, more prioritize the smooth repayment compared the concept of empowerment, taking and executing layout policies were in accordance with the mechanisms and provisions laid down. Resources adequate in terms of quality but felt less in terms of quantity. Obstacles encountered are lacking of coordination and communication so that an understanding of the purpose of the SPP program to the community have not precise. Even so, with the construction will attempt by those who are still less so that there is no significant development for the efforts.

Abstrak: Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Tim UPK, dan masyarakat pemanfaat (kaum perempuan) kelompok SPP di Nagari Tanjung Betung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan termuat kepentingan baik itu untuk UPK, wilayah pelaksana, maupun pemanfaat dana SPP, masih kurang maksimalnya manfaat dan perubahan yang di peroleh dikarenakan sasaran dari program yang kurang tepat yaitu pada Non RTM, lebih memprioritaskan kelancaran pengembalian kredit dibandingkan konsep pemberdayaan, letak pengambilan dan pelaksana kebijakan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan. Sumberdaya dari segi kualitas cukup memadai namun dirasakan kurang dari segi kuantitas. Kendala yang ditemui adalah dari segi koordinasi dan komunikasi yang kurang sehingga pemahaman akan tujuan program SPP kepada masyarakat belum tepat. Begitu juga dengan pembinaan akan usaha mereka yang masih kurang sehingga belum adanya perkembangan yang signifikan atas usahanya.

Kata Kunci: implementasi, program PNPM-MPd, kegiatan SPP, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat melalui peningkatan akses pada pemeliharaan kesehatan, program pengentasan kemiskinan dan pelayanan pendidikan. Kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumberdaya pembangunan. Sasaran pembangunan yang berorientasi pada wilayah tertinggal dapat berupa peningkatan dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, jalan umum dan prasarana air bersih.

Harapan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah dengan upaya pengentasan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang belum kunjung selesai ditanggulangi. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sudut, kemiskinan material dan kemiskinan kultural. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut maka pemerintah telah mencanangkan dan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu programnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd). Melihat ke-

berhasilan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, yaitu PKK yang berlangsung sejak 1998-2006, maka pemerintah melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) MP. Program ini suatu usaha pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan unsur masyarakat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Pemerintah Indonesia mengukuhkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dengan No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Program PNPM terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perkotaan, serta Program Nasional pemberdayaan Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Program Nasional Mandiri Pedesaan didanai oleh BLM.

Kabupaten Pasaman sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, tidak luput dari masalah kemiskinan. Salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman yang menerima pendanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan adalah Kecamatan Rao Selatan. Pada kecamatan ini ada tiga nagari yang memperoleh alokasi dana program PNPM-MPd dan kegiatan PNPM yang dilaksanakan berupa Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Gedung MDA Plus, Pembangunan Prasarana Air Bersih, Pembangunan Jembatan Gantung dan mobiler, serta Simpan Pinjam Perempuan.

Pada Kecamatan Rao Selatan ini salah satu nagari yang mendapatkan program ini adalah Nagari Tanjung Betung dimana yang menjadi kajian salah satu programnya adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Nagari Tanjung Betung yang sudah realisasi dari tahun 2010 – 2011. Kegiatan SPP merupakan suatu bentuk kegiatan penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan

kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan.

Permasalahan yang menjadi fenomena dalam pelaksanaan program ini adalah adanya tunggakan atau kemacetan pengembalian, ketidaktepatan sasaran kegiatan, dan mekanisme implementasi sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Menurut peminjam, persyaratan pinjaman yang mewajibkan adanya anggunan bagi pemohon dan juga syarat “produktif” dalam hal ini usaha menyulitkan masyarakat miskin yang ingin mengajukan permohonan.

Berbagai program telah dipilih pemerintah sebagai alternatif pemecahan masalah dan diformulasikan dalam kebijakan publik harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun instansi-instansi pemerintah tingkat bawah melalui mobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Keberhasilan sebuah kebijakan harus juga diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila cuma kebijakannya saja yang baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/implementasinya yang baik, maka pencapaian target yang sudah dicita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Menurut para ahli kebijakan, memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direpson berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Tangkilisan, 2008). Sementara Grindle dalam Nugroho (2009) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses administrasi dan sekaligus sebagai proses politik, dimana keberhasilan dari implementasi tersebut akan ditentukan oleh berbagai faktor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan kendala kegiatan Simpan Pin-

jam Perempuan di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman dalam (PNPM) Mandiri Pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis, data dari dokumen, dan studi literatur. Kemudian dilakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Perempuan

Mengingat apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang mana penulis memfokuskan pada salah satu dari bagian program ini, yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sangat berarti untuk kemashlahatan orang banyak terutama bagi rumah tangga miskin agar lebih sejahtera dan dapat meningkatkan derajat kehidupannya.

Kegiatan SPP telah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan semenjak tahun 2010 hingga sekarang. Namun dalam perjalanannya implementasinya ditemui beberapa permasalahan, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana implementasinya dilihat dari segi isi kebijakan (*content*) dan segi lingkungan kebijakan (*context*) yang dikemukakan Grindle (1980) dalam Nugroho (2009), yaitu isi kebijakan (*content*) terdiri dari: kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat peru-

bahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dipengaruhi. Sedangkan dari segi konteks implementasinya terdiri dari: kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Program Simpan Pinjam Perempuan

Kepentingan PNPM, Masyarakat (Pemanfaat) SPP, dan Pemerintah Daerah

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan ini melihat bahwa sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Dimana kebijakan tersebut apakah akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, yaitu pada implementasi program kegiatan SPP di Nagari Tanjung Betung.

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dimaksud di sini adalah apabila kebijakan program kegiatan SPP menimbulkan perubahan-perubahan terhadap hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan dari program ini. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Pada program kegiatan ini terlihat bahwa kepentingan yang termuat adalah kepentingan dari organisasi pengelola kegiatan dipengaruhi oleh keberadaan program kegiatan SPP. Dimana keberadaan kegiatan ini membawa dampak bagi keberlanjutan UPK, yaitu dana operasional UPK 2% dan operasional desa 3%. Selanjutnya kepentingan bagi daerah pelaksana dimana akan jika terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman dana SPP oleh kelompok peminjam, maka akan tertutup akses masyarakat untuk mendapatkan program usulan pada PNPM tersebut. Tentu ini sangat memberikan dampak negatif bukan hanya bagi Nagari Tanjung Betung

namun juga bagi Kecamatan Rao Selatan. Kemudian kepentingan yang diterima oleh kelompok pemanfaat yaitu dengan program SPP ini akan membantu mereka dalam usahanya dalam bentuk bantuan modal.

Peningkatan Ekonomi dan Pengembangan Usaha

Pada indikator tipe manfaat ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Program SPP membawa manfaat untuk penambahan modal usaha yang nantinya usaha tersebut dapat berkembang dan akan membantu pendapatan serta meningkatnya perekonomian keluarga RTM. Tentunya manfaat yang dirasakan ini belum sesuai dengan tujuan SPP yaitu untuk mengurangi rumah tangga miskin. Meskipun jika dilihat tujuannya sebagai pendanaan usaha skala mikro, dana tersebut digunakan tetapi bukan kepada sasaran yang tertera pada ketentuan SPP.

Perubahan Kondisi RTS Setelah Pelaksanaan Kegiatan SPP

Setiap kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari berbagai bentuk tujuan kebijakan tersebut, salah satunya selalu dimaksudkan untuk melakukan perubahan tentang berbagai hal. Sebagaimana indikator perubahan yang diinginkan pada implementasi kegiatan SPP ini sesuai dengan tujuannya, yaitu pengurangan rumah tangga miskin pada Nagari Tanjung Betung secara statistik telah mengalami perkembangan penurunannya. Namun secara observasi yang tampak di lapangan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakatnya belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya sebagian besar pemanfaat adalah kalangan non RTM. Adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran dari masyarakat RTM untuk meminjam dikarenakan adanya kekeliruan pemahaman akan tujuan dari program, yaitu kelancaran program menjadi syarat untuk program fisik berikutnya.

Kedudukan Pengambil Keputusan Pelaksanaan Kegiatan SPP

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik,

baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Dilihat dari segi struktur organisasi, lembaga PNPM yang ada di Nagari Tanjung Betung dan Kecamatan Rao Selatan sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan program di lapangan. Dari hasil musyawarah rencana pembangunan yang ada tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan pengambil keputusannya telah jelas dipaparkan letak pelaku-pelaku SPP sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan sampai kepada sanksi yang diterapkan.

Kejelasan Implementor Program Kegiatan SPP

Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Untuk pelaksana program kegiatan SPP yang ada di Nagari Tanjung Betung telah sesuai dengan alur yang ditentukan dan tugas yang relevan dengan fungsinya sebagai implementor.

Kualitas dan Kuantitas SDM Implementor Kegiatan SPP

Sumber daya yang memadai baik dalam bentuk SDM dan non-SDM merupakan bagian pendukung keberhasilan implementasi suatu program/kegiatan. Memadai disini artinya dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya, yaitu ketersediaan dari sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia sebagai implementor di program SPP yang ada ini cukup berpendidikan dan berpengalaman. Akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan lagi agar kualitasnya mencukupi.

Lingkungan Kebijakan Program

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Implementor Kegiatan SPP

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Kekuasaan/kewe-

nangan dan strategi pada program kegiatan SPP di Nagari Tanjung Betung, adalah Tim UPK, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan. Sedangkan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan program kegiatan SPP adalah tahap sosialisasi dengan mengajak dan memotivasi kepada perempuan-perempuan untuk membentuk kelompok-kelompok SPP agar ikut serta dalam program. Namun strategi dalam menentukan sasaran sebagai pemanfaatnya dirasakan masih kurang karena masih terdapat pemanfaat yang termasuk non RTM. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari program, yaitu untuk mendorong pengurangan rumah tangga miskin.

Karakteristik Rezim yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang mementingkan kepentingan rakyat tentu kesejahteraan warga akan tercapai. Namun akan terjadi sebaliknya jika rezim yang berkuasa lebih mementingkan kepentingan pribadi atau perorangan. Rakyat akan menjadi dipojokkan dan bukan menjadi prioritas. Peran dari lembaga yang mengimplementasikan program kegiatan SPP ini sangat mendukung terlaksananya program untuk kepentingan rakyat. Namun ini belum secara maksimal dilakukan terutama pada penentuan sasaran dari kebijakan. Kurangnya memotivasi masyarakat RTM untuk ikut serta dalam kegiatan. Tetapi ini malah membuat masyarakat miskin takut dan khawatir untuk ikut karena tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut.

Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu pemanfaat dana dari kegiatan SPP ini harus berperan aktif, karena hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan program dari pemerintah. Daya tanggap pemanfaat sangat antusias terutama pada tahun 2014 yaitu ada 25 kelompok, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 10 kelompok.

Kendala-kendala dalam Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Dari proses implementasi tentunya akan mengalami beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala dalam implementasi kegiatan SPP

yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan.

Pertama, koordinasi antara pelaksana di tingkat kecamatan dan nagari yang kurang berjalan dengan baik. Koordinasinya tentang pendataan sasaran dari program, yaitu pemanfaat dana masih belum terdata secara benar oleh nagari ke kecamatan, artinya pemanfaatnya masih banyak ditemukan dari non RTM. Ini dikarenakan pada saat sosialisasi, ada penekanan bahwa SPP merupakan program wajib, sehingga apabila mengalami kemacetan maka nagari tersebut tidak akan mendapatkan proyek infrastruktur dari PNPM- MPd.

Kedua, komunikasi yang kurang maksimal antara pelaksana program dengan pemanfaat kegiatan SPP tersebut. Komunikasi merupakan hal yang kendala yang ditemui di lapangan adalah analisis verifikasi usaha hanya dalam bentuk data saja. Ini tentunya dalam pencapaian perubahan pada kondisi ekonomi masyarakat belum tercapai, karena jika verifikasi di lapangan dengan melihat langsung kondisi usaha dari pemanfaat maka akan lebih tepat dana tersebut digunakan.

Ketiga, pembinaan yang kurang dari implementor kegiatan SPP. Sasaran programnya adalah RTM yang produktif dimana RTM yang membentuk kelompok-kelompok SPP tersebut memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar. Dalam observasi yang penulis lakukan di lapangan pembinaan dalam implementasi kegiatan SPP belum terwujud. Salah satu kendalanya adalah tidak adanya pembinaan seperti bagaimana teknik pengembangan usaha agar menambah pendapatan dan tercapainya kesejahteraan, lembaga-lembaga pelatihan, aspek promosi usaha dan pemasaran, dan lain sebagainya.

Keempat, syarat anggunan yang memberatkan pemanfaat terutama masyarakat RTM untuk ikut serta dalam kegiatan pendanaan SPP ini. Syarat tersebut berupa anggunan berupa barang yang bisa diuangkan di kemudian hari, meskipun tidak menyerahkan surat-suratnya. Dan juga syarat bahwa RTM (Rumah Tangga Miskin) harus “produktif”, artinya harus memiliki usaha, sedangkan sebagian besar RTM belum

memiliki usaha dengan dapat pinjaman modal maka RTM akan membuka usahanya. Pemanfaat berharap untuk mendapatkan dana SPP agar lebih dipermudah lagi sehingga pemanfaat dari RTM dapat antusias ikut serta dalam kegiatan SPP, bukan malah merasa khawatir bahkan takut untuk terlibat dalam program.

SIMPULAN

Implementasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman dalam PNPM MPd belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari manfaat dan perubahan yang belum tercapai dikarenakan sasaran pemanfaatnya belum sesuai dengan tujuan dari program yaitu masyarakat RTM, kemudian adanya konsep lebih mengutamakan kelancaran pengembalian dana SPP yang dinilai sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dana program fisik selanjutnya bukan pada konsep sesungguhnya, yaitu sebagai program pemberdayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta: Prenada Media Group
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Anggraini. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Soemitro, Sutyastie Remi dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.